

# Ketika Jargon Energi Bersih Mengorbankan Air Jernih, Sudahkah Transisi Energi Adil dan Jadi Solusi?



**Ketika Jargon Energi Bersih Mengorbankan Air Jernih,  
Sudahkah Transisi Energi Adil dan Jadi Solusi?**

©2025

Penulis:

**Luthfi Maulana Adhari (Jurnalis Konde.co)**

Tim Penyunting:

**Konde.co**

**Asosiasi LBH APIK Indonesia**

Tata Letak

**N. Roji Wahwan**

Diterbitkan oleh:

**Asosiasi LBH APIK Indonesia**

**Kalyanamitra**

*“Air mata perempuan mengalir lebih deras dari pembangunan bendungan yang menjanjikan kemakmuran. Di tanah yang dulu memeluk akar-akar aren dan bambu, kini berdiri beton-beton angkuh yang mencuri mata air kehidupan. Semua dilakukan atas nama transisi energi, atas nama proyek strategis nasional, dan atas nama kapital.”*

## Luthfi Maulana Adhari

**D**i sudut-sudut sunyi Lombok Barat, di antara lengkung perbukitan yang dulu hijau, ini tanah merekah, meratap bisu. Perempuan-perempuan di lingkaran Bendungan Meninting menggenggam harapan yang kian terkikis.

Bendungan Meninting, yang diikrarkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), menjanjikan kemakmuran: irigasi bagi ratusan hektar sawah, pasokan listrik, serta sumber energi bersih bagi masyarakat.

Namun, di balik janji itu, suara-suara perempuan yang kehilangan tanah, mata pencaharian, bahkan kesehatan mereka semakin sayup, tertelan riuh gempita pembangunan yang tak berpihak. Pembangunan yang menelan anggaran Rp1,4 Triliun oleh PT Hutama Karya, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini masih terus berlangsung hingga kini. Proyek yang digadang akan mengakomodasi kebutuhan air 0,15 meter per kubik serta irigasi seluas 1.559 hektare hingga penyokong Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau mikrohidro dengan pasokan listrik 0,8 megawatt ini berkali-kali mundur dari target potong pita, berkali-kali pula masyarakat memendam derita.



# Prolog

**T**anah dan hutan bagi perempuan-perempuan buruh tani di lingkaran Bendungan Meninting bukan

sekadar sebidang lahan, tetapi rahim kehidupan. Dari sanalah mereka menanam asa, memanen harapan, dan menjaga tradisi yang mengalir turun temurun. Hari ini tidak lagi sama, tidak akan pernah sama, proyek bendungan seluas 90 hektar, termasuk 4,95 hektar kawasan hutan lindung, merampas ruang hidup mereka. Kebun aren, bambu, dan pangan lokal yang menopang ekonomi perempuan, lenyap dalam hitungan bulan oleh proyek yang simpang siur soal persentase penyelesaian pengerjaannya.

Jebolnya tanggul bendungan pada Juni 2022 menjadi pertanda bahwa proyek ini lebih banyak mendatangkan bencana ketimbang sejahtera. Hilangnya tutupan hutan lindung di kawasan hulu membuat desa-desa menjadi liat, terlumpur banjir dan longsor.

Perempuan yang bertahun-tahun menjaga air agar tetap mengalir bagi anak-anak mereka, kini harus meratap pada air yang dulunya jernih berubah keruh dan berlumpur. Mereka harus berjalan lebih jauh untuk mencari sumber air bersih, menukar waktu yang seharusnya mereka habiskan untuk bercocok tanam atau merawat keluarga.

Perempuan-perempuan ini, yang tubuhnya menopang keluarga dan komunitas, justru menjadi yang paling terdampak.



Penggunaan air yang kotor membuat kulit mereka meradang, infeksi bersarang di tubuh-tubuh yang lelah. Solidaritas Perempuan (SP) mencatat setidaknya sebanyak 100 perempuan di Desa Gegerung dan Dasan Geria mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan air yang tak layak.

Kalkulasi proyek pembangunan sering kali hanya menyebut angka-angka keuntungan, tanpa menyisakan ruang bagi kehidupan yang nyata, bagi perempuan yang merasakan air berlumpur di kulit mereka, bagi anak-anak yang meminum cairan bercampur oli dari sungai yang mati.



Tak hanya kehilangan tanah dan kesehatan, perempuan di sekitar Bendungan Meninting juga menghadapi ketakutan yang berulang yang merayapi setiap sudut rumah mereka. Gempa bumi yang kerap mengguncang Lombok membawa ancaman risiko jebolnya bendungan.

Perempuan yang tinggal di hilir sungai hidup dalam kecemasan, memikirkan kemungkinan banjir bandang yang bisa menyapu rumah dan keluarga mereka kapan saja.

Trauma ini menumpuk, mengingatkan mereka pada betapa rentannya posisi mereka dalam narasi pembangunan yang maskulin, di mana suara mereka tak pernah cukup didengar.

Bendungan Meninting juga dijustifikasi sebagai bagian dari transisi energi berkelanjutan, dengan alasan dapat menyediakan energi bersih. Pada praktiknya, justifikasi ini lebih banyak digunakan sebagai alat legitimasi proyek tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang luas.

Sebagaimana kesaksian Yayuk (28), perempuan warga Desa Gegerung, Dusun Ketapang yang mendapati cerita beberapa warga di Dusun tetangganya, Jelateng, diberikan informasi serupa janji manis tanpa bicara soal dampak lingkungan yang bisa terjadi.

“

Warga Jelateng dikasih tahu kalau akan dibangun bendungan dan dijabarkan manfaat-manfaatnya saja.”  
cerita Yayuk.

Narasi transisi energi sering kali mengabaikan bahwa proyek semacam ini tetap berbasis ekstraktif—mengambil sumber daya lokal, menggusur masyarakat adat dan perempuan, serta menimbulkan ketidakadilan ekologi.

Listrik yang dihasilkan pun tidak serta-merta diberikan kepada masyarakat terdampak.

Perempuan-perempuan di sekitar bendungan masih bergelut dengan ketidakpastian akses terhadap sumber daya dasar, termasuk air bersih dan lingkungan yang sehat. Mereka yang kehilangan lahan dan pekerjaan akibat proyek ini tidak mendapatkan kompensasi layak, apalagi kesempatan untuk terlibat dalam kebijakan energi yang benar-benar inklusif.

Pembangunan infrastruktur besar seperti bendungan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang ketimpangan kekuasaan yang melemahkan kelompok-kelompok rentan. Ketika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan suara perempuan, maka dampak yang dihasilkan akan semakin menindas mereka. Keadilan iklim harus menjadi payung hukum yang melindungi perempuan dari dampak buruk proyek pembangunan yang tidak inklusif. Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim yang diusulkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil menjadi harapan agar pembangunan



## I. Padamu Negeri, Jiwa Raga (Gadai) Kami

**I**smiyati (33) duduk di teras rumahnya yang baru, menatap semen yang ia beli dengan uang sendiri. Rumah ini bukanlah rumah yang ia impikan, melainkan rumah pengganti dari tempat tinggal lamanya yang digusur untuk pembangunan Bendungan Meninting.



“Kami tidak mau digusur sebenarnya, tapi ya bagaimana, ini proyek pemerintah. Kita bisa apa?” katanya lirih.

Dulu, sebelum mesin-mesin berat datang, tanah ini adalah bagian dari hidupnya. Pohon-pohon aren tumbuh subur dan di sela-sela pepohonan, suara burung-burung bercampur dengan gemericangin yang ditahan pohon.

“Pohon aren di bawah sana sudah habis untuk proyek,” ujar Ismiyati, mengenang betapa dulu setiap hari ia pergi menyadap aren, mengumpulkan hasilnya untuk dibagi tiga hari: dua hari untuk dirinya dan keluarga, satu hari untuk pemilik lahan. Dari dua hari itu, rata-rata ia mendapatkan 180 ribu rupiah. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan.

Namun, kesejahteraan yang dijanjikan tak pernah benar-benar hadir. Kompensasi yang diterima berbeda-beda, tergantung nasib masing-masing.

“Saya dapat 8 juta per are, minta 10 juta tidak diterima,” katanya.

“Rumah diganti rumah, tapi tidak sesuai dengan rumah yang digusur. Lebih banyak mengeluarkan uang lagi. Habisnya lebih dari 19 juta. Dibilang untung ya rugi, dibilang rugi, ya setidaknya ada rumah,” ucap Ismiyati getir.

Selain aren, durian diakui Ismiyati gagal panen tahun di tempatnya tahun ini. Beberapa pohon durian yang ada ini tinggal pohon dan daun.

“Durian gagal panen sejak tahun ini, kemarin masih ada, tapi buahnya sedikit, padahal ada pohon ada daunnya. Pembangunannya setahun terakhir juga diperluas,” cerita Ismiyati.

## Tragedi di Balik Megaprojek

T

idak hanya buruh tani aren seperti Ismiyati, bendungan juga memakan korban para pekerjanya. Masyarakat sekitar, termasuk Ismiyati seperti lazim mendengar pekerja proyek yang meninggal dalam kecelakaan.



“

"Banyak yang meninggal di bendungan sana," ucap Ismiyati pelan

Salah satu yang meninggal adalah seorang tetangga Ismiyati dari Desa Bukit Tinggi. "Dia semacam yang mengawasi truk. Dia baru dua bulan (bekerja di sana) mungkin," kenangnya.

Ketika satu nyawa melayang, kemarahan warga pun pecah. "Warga sempat mengamuk, mobil rusak, kantor rusak."

Tetapi amarah itu tidak mengubah banyak. Truk-truk tetap berlalu lalang, mesin-mesin tetap meraung, bendungan terus dibangun. Sementara itu, Ismiyati dan perempuan-perempuan lain hanya bisa bertahan, menggenggam kenangan tentang tanah aren yang dulu mereka sebut rumah.

Kini, dengan pembangunan yang semakin mendesak, kehidupan harus terus berjalan. Mereka yang masih bertahan di sekitar proyek harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak bisa mereka lawan.

"Ini kerja 24 jam, gak pernah tutup," kata Ismiyati, mengeluhkan betapa proyek ini tak pernah memberi ruang untuk jeda.

Meski segala telah berubah, perempuan seperti Ismiyati masih tetap berpegang pada satu harapan meski kecil. Harapan bahwa suatu hari nanti, kehidupan yang lebih adil akan datang. Harapan bahwa di antara debu proyek dan suara mesin berat, suara mereka masih bisa didengar. Bahwa tanah aren yang dulu subur akan kembali hijau, dan mereka yang telah kehilangan akan menemukan tempat untuk pulang.

## II. Banyak Pohon Banyak Air, Tidak Ada Pohon Banyak Air Mata



### Mengumpat Air yang Cokelat

Matahari baru saja merayap naik ketika suara batuk dan keluhan dari warga mulai terdengar di Desa Gegerung dan Dasan Geria. Sejak Bendungan Meninting mulai dibangun pada tahun 2019, desa ini berubah menjadi ladang ketidakpastian. Air yang dahulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi sumber derita.

Lumpur, oli, dan limbah dari proyek bendungan mengalir diduga warga hanyut ke sungai bertahun-tahun, menyebabkan air yang dulunya jernih kini berubah keruh dan tidak layak pakai.

Ida, salah satu aktivis Solidaritas Perempuan (SP) yang mengorganisir warga, bercerita bagaimana awalnya warga hanya bisa bertanya-tanya mengenai air yang bercampur lumpur hingga oli.

“

Awalnya, warga tidak sadar. Air jadi keruh, banyak yang sakit kulit, gatal-gatal, gangguan pencernaan. Tapi baru di tahun 2021, setelah kami dampingi, mereka tahu bahwa ini akibat aktivitas bendungan.”

Yayuk (28), perempuan warga Desa Gegerung, Dusun Ketapang, mengingat bagaimana perubahan ini terjadi secara perlahan tetapi pasti.

“Dulu air kami bersih, kami sudah mengalir dari pipa yang dibangun tahun 2015. Tapi sejak 2019, tiba-tiba airnya keruh. Kami tidak tahu kenapa, sampai SP (Solidaritas Perempuan) datang dan menjelaskan bahwa penggalian bendungan yang menjadi penyebabnya,” jelas Yayuk.

Yayuk menuturkan bahwa dalam sosialisasi resmi terkait pembangunan bendungan, perempuan tidak pernah dilibatkan.

“Kalau untuk sosialisasi soal bendungan secara resmi, perempuan tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.

Namun, ia juga mendengar cerita dari beberapa warga di Dusun Jelateng bahwa dalam pertemuan-pertemuan yang ada, mereka hanya diberi tahu bahwa bendungan akan dibangun dan dijelaskan manfaat-manfaatnya, tanpa ada ruang diskusi atau partisipasi lebih lanjut bagi warga, terutama perempuan.

Perempuan tidak pernah menyangka datangnya alat berat akan membuat kondisi air tidak menentu hingga membuat kehidupan semakin sulit. Setiap matahari terbit, selain bendungan yang belum juga diresmikan, air yang datang ke warga diakui kian parah. Bahkan menurut Yayuk, lima bulan air tidak mengalir ke pipa-pipa di dusunnya.

“Kalau pagi hari dari jam 12 malam sampai 9 pagi airnya jernih. Tapi mulai jam 10 pagi sampai sore, airnya keruh karena aktivitas penggalian. Sekarang, sudah berjalan hampir enam tahun dan makin parah. Kadang 24 jam penuh airnya keruh, kadang tidak ada air sama sekali. Sudah lima bulan ini di Dusun Ketapang, air tidak mengalir sama sekali.”

Warga sejatinya sudah heran sebab kala itu terkadang air menjadi jernih hanya pada tanggal merah, hari libur nasional, dan hari raya, saat aktivitas penggalian terhenti. Warga pun mulai sadar, jernihnya air bukan kebetulan, tetapi akibat berhentinya aktivitas di bendungan.

Kini, Yayuk dan warga lainnya mesti mengantre untuk mendapatkan air. Mereka mesti bangun subuh untuk mengantre air yang digunakan setiap harinya.



“

Jadi, warga yang rumahnya di pinggir jalan lebih dulu mendapatkan air. Kalau saya ingin memasukkan air dari selang ke rumah, alirannya sering disekat oleh warga di pinggir jalan.”

“

Orang-orang di pinggir jalan mengambil air lebih dulu, menampung sebanyak-banyaknya. Kami harus menunggu. Bahkan, saya dan mertua sering pergi mengambil air jam 1, jam 2, atau jam 3 pagi sampai subuh untuk bisa mendapatkan air,” ujar Yayuk.

Disisi lain, bagi perempuan muda di desa, situasinya menjadi semakin pelik. Kehidupan yang seharusnya diwarnai keceriaan, kini diisi kekhawatiran akan hal yang paling mendasar yakni air bersih.

Mia (21) mengungkapkan keresahannya sebagai seorang perempuan muda yang harus beradaptasi dengan keterbatasan ini.

“Sebagai perempuan muda, kebutuhan kami berbeda dengan orang tua. Mulai dari mandi hingga mencuci pakaian, semua jadi sulit. Kalau di sini bilang sudah ‘dedare’, pasti butuh air lebih,” keluhnya, mengacu pada kebutuhan esensial perempuan yang sedang mengalami menstruasi dan kebutuhan lainnya.



Maryam (54), seorang perempuan buruh tani mengingat masa-masa ketika Dasan Geria, kawasan di dekat kampung mereka, masih rimbun dan kaya sumber air. Kini, tempat itu dipandang malang sebab berubah drastis.

“Kami juga sering pergi ke Dasan Geria untuk melihat keadaan di sana. Dulu, kawasan itu rimbun dan airnya bersih. Sekarang kondisinya sudah berubah drastis. Meskipun bangunan bendungan terlihat megah, kenyataannya alat berat pun pernah hanyut akibat kerusakan bendungan. Kami khawatir dengan masa depan anak dan cucu kami di daerah ini,” terang Maryam.

Kekhawatiran Maryam nampak pada mata Raknah (36) yang sehari-hari menjalani hidup selayaknya ibu rumah tangga dengan kesederhanaan. Sejak kecil, ia sudah tinggal di Desa Dasan Geria. Selain mengurus rumah, ia juga aktif sebagai kader di komunitas Sekolah Setara yang diinisiasi Gema Alam NTB untuk pemajuan perempuan desa.

“

Air mulai kotor sejak pengerukan bendungan dimulai,” kenang Raknah, matanya menatap jauh ke masa lalu.





Sebelum itu, air dari sungai jernih dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, air yang dulunya bersih berubah menjadi keruh dan sulit diandalkan. Senasib dengan nasib buruk di wilayah lingkaran bendungan lainnya.

“

Sebelum ada bendungan, kami semua memanfaatkan air sungai. Tapi setelah ada bendungan, airnya jadi keruh,”

ujar Raknah, mengenang masa ketika air bersih masih mudah didapatkan.

Kini, air yang digunakan warga berasal dari berbagai mata air kecil di sekitar desa. Mata air ini dialirkan ke kolam penampungan sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga. Kolam tersebut awalnya milik pribadi yang digunakan untuk memelihara ikan.

Seiring meningkatnya kebutuhan air bersih, pemilik lahan berinisiatif memanfaatkannya untuk kebutuhan warga. Kendati begitu, pemanfaatan air tersebut masih terbatas. Hanya dua rukun tetangga yang dapat memanfaatkan air ini.

"Kami memperbesar pipa menggunakan dana aspirasi agar alirannya lebih luas," jelas Suhaili (40), suami Raknah yang ikut berbincang selepas bekerja sebagai tata usaha di sekolah kejuruan.

Meski begitu, air yang mengalir ke rumah-rumah dari penampungan tersebut keruh cenderung putih. Bak tiada rotan terpaksa akarpun jadi, tiada air bersih, lebih baik pikir Raknah ketimbang mandi bercampur lumpur.



"Ya begini lah, putih airnya keruh, mending lah daripada harus pakai air yang cokelat kayak kopi susu itu, kan," sambung Raknah.

"Airnya keruh, mau tidak mau kami pakai. Kalau ada uang, kami beli air isi ulang," timpal Suhaili.

Air isi ulang menjadi barang berharga bagi warga. Dengan harga Rp5.000-Rp6.000 per galon, tidak semua orang mampu membelinya secara rutin. Bagi warga yang mayoritas buruh tani, membeli air bergantung pada keberadaan uang di tangan. Jika tidak ada uang, air yang cokelat terpaksa dipakai dengan mengendapkan lumpurannya sehari-hari.

Sebelum pengerukan bendungan, sungai adalah sumber utama air bersih bagi warga. Air sungai digunakan untuk mencuci dan memasak.

Menggunakan air yang tercemar membawa konsekuensi serius. Banyak warga, terutama anak-anak, mengalami gatal-gatal.

“

Warga, perempuan, laki-laki, anak-anak semua mengeluh gatal-gatal.”

"Terutama anak-anak, suka bermain di air dari bendungan, sulit bagi kami untuk mengontrol mereka," kata Raknah dengan nada cemas.

Masalah kesehatan ini bukan hanya dialami oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa, termasuk perempuan. Yayuk mendapati kasus perempuan yang mengalami penyakit kelamin di Dusun Ketapang akibat air kotor.

"Kami juga menemukan adanya perempuan yang terkena semacam penyakit kulit di daerah kewanitaan akibat air itu," paparnya.

## Kami Takut Mati, Lawan

“

Kami merasa takut. Kalau suatu saat bendungan ini jebol, bagaimana nasib kami yang tinggal dekat dengan sungai?” tanya Sri Indrayani (36) lirih.

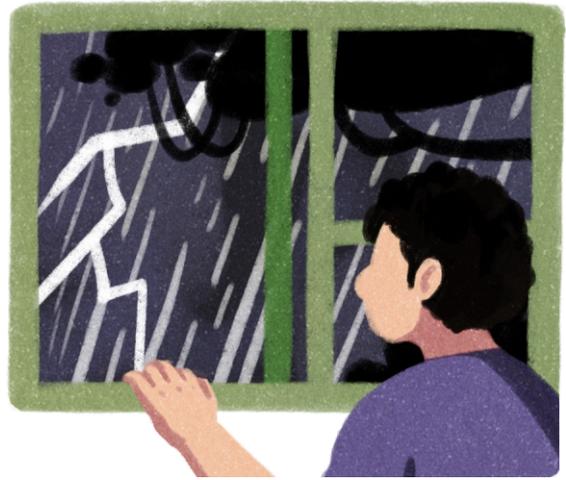
Kekhawatiran terbesar warga bukan hanya air yang mengeruh, tetapi juga air yang mengamuk. Setiap hujan deras, warga mulai ketakutan, karena air bah dari bendungan bisa saja meluap dan menenggelamkan desa mereka.

Menurut Sri, mitigasi bencana seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah desa maupun pihak bendungan untuk memberikan pelatihan mitigasi bencana bagi warga.

“Kami merasa perlu ada pelatihan mitigasi bencana agar kami tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu. Ketakutan itu nyata. Bahkan sebelum bendungan jebol pun, saat air bah datang, kami sudah merasa cemas karena air bisa meluap hingga ke desa,” ungkap Sri.

Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Sri bercerita bagaimana suatu malam hujan turun tanpa henti. Air dari sungai meluap perlahan, menyapu pinggiran desa. Dalam gelap, warga berjaga-jaga di rumah masing-masing, takut jika tiba-tiba air membanjiri rumah mereka. Beberapa keluarga memilih mengungsi sementara ke rumah sanak saudara di dataran yang lebih tinggi.

Bukan hanya ancaman banjir yang mengintai, tetapi juga ketidakpastian masa depan. Bendungan yang dibangun dengan janji membawa kesejahteraan berjargon “transisi energi”, kini terasa seperti bayang-bayang bencana.



“Setiap kali mendengar suara hujan deras di malam hari, kami tidak bisa tidur nyenyak,” lanjut Sri dengan suara bergetar.

Tidak hanya nama yang mirip, Sriyanti (36), perempuan disabilitas dari Dusun Gegutu Reban memiliki perasaan senasib dengan Sri. Ia merasakan sendiri bagaimana banjir lebih cepat dan mudah datang sejak Bendungan Meninting mengeluarkan debu. Sungai dirasanya kian kecil dan sempit akibat endapan lumpur entah dari mana. Belum lagi sampah kiriman dari hulu yang menyapu halaman rumahnya ketika banjir datang.

“Setelah ada bendungan, sungai mengecil dan menyempit. Kami juga menerima sampah kiriman dari hulu. Kami punya tim TSBD (Tim Siaga Bencana Desa) untuk memonitor kondisi sungai,” papar Sriyanti

Ketika hutan sudah dipangkas, tanah sudah dikeruk, mangkuk bendungan sudah terbentuk, sulit bagi Sri, Sriyanti, dan kawan-kawan perempuan di lingkaran bendungan untuk menghentikan proyek tersebut. Kendati begitu, bukan berarti mereka lantas diam tidak melawan, perempuan di lingkaran bendungan kini bergandengan untuk mengadvokasi tanggung jawab sosial pemerintah dan perusahaan akan dampak yang mereka alami.

"Memang, saat ini kita tidak bisa lagi melakukan advokasi untuk menghentikan proyek bendungan karena sudah berjalan selama beberapa tahun. Oleh karena itu, kami sekarang lebih fokus pada bagaimana mendorong tanggung jawab sosial dari desa dan pengembang terhadap masyarakat. Salah satunya melalui tanggung jawab negara yang dijalankan melalui pemerintah desa."

"Tanggung jawab negara memang ada, tetapi implementasinya dilakukan melalui tingkat desa sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat. Fokus kami adalah bagaimana meminimalisasi risiko terjadinya bencana di desa, terutama karena posisi desa kami berada tepat di bawah bendungan tersebut," papar Sri.

Saat ini, meski pihak desa menurut Sri menyambut baik, keterbatasan dana menjadikan implementasi sulit untuk direalisasi.

"Salah satu hambatannya adalah keterbatasan dana di tingkat desa. Jadi, meskipun ada kesadaran, tindakan nyata atau solusi jangka panjang masih sulit dilakukan,"ujarnya.

Sri kemudian mengeluhkan kondisi jalanan yang rusak akibat lalu-lalang alat berat. Setiap kali kendaraan melintas, debu halus berhamburan di udara, membentuk kabut tipis yang perlahan menyelimuti rumah-rumah warga. Debu-debu itu menempel di jendela, di dinding, bahkan di pakaian yang dijemur. Jika hujan datang, lubang-lubang besar di jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui.

"Masalah lingkungan juga terasa berat. Jalanan rusak, debu di mana-mana, dan panasnya luar biasa. Kalau kami mengenang dulu, kami hidup dengan nyaman. Sekarang, rasanya ingin menangis kalau bicara soal air,"kenang Sri.

Di Dasan Geria, warga tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Mereka pernah mengirimkan surat kepada pihak pengelola bendungan untuk meminta solusi berupa pembuatan sumur bor. Sayangnya, hingga kini tidak ada jawaban atau tindak lanjut.

"Kami sudah bersurat, tapi tidak ada balasan," keluh Raknah.

Kini, keluhan-keluhan warga lebih sering disuarakan melalui media sosial. Mereka berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk memperbaiki kondisi air di desa mereka.

Perlawanan juga dilakukan oleh warga Dusun Jelateng. Pada tahun 2023, mereka melakukan aksi demonstrasi di kantor desa, menuntut solusi atas masalah yang mereka hadapi.

Maryam menjadi salah satu perempuan peserta aksi yang saat itu menuntut sumur bor. Ia bercerita bahwa mulanya perempuan dilarang ikut bersuara oleh para lelaki. Mendengar itu amarahnya memuncak, ia merasa perempuan memiliki kerentanan berlipat dan berhak menyuarakan keresahannya.

"Kami menuntut kompensasi berupa sumur bor. Saat itu banyak aparat seperti polisi dan tentara. Perempuan sempat dibilang tidak usah ikut, tapi kami yang paling vokal, kami adalah perempuan, karena kami yang paling merasakan dampaknya," ujar Maryam.

Perempuan setengah baya dengan wajah yang menyimpan lelah panjang itu juga masih mengeluhkan betapa keringat mereka untuk memperjuangkan kompensasi dari perusahaan bendungan Utama Karya berupa dua sumur bor tak mampu memenuhi kebutuhan seluruh kampung. Di Dusun Ketapang, pipa tidak menghubungkan air dengan baik hingga warga masih kesulitan mendapatkan akses air.



“

Kompensasi yang diberikan berupa dua sumur bor. Tapi, sumur bor ini tidak bisa mencukupi kebutuhan air bersih untuk seluruh kampung.”

“Di tempat kami di Jelateng, Alhamdulillah air dari sumur bor berjalan lancar. Tapi dusun lain di sekitar kami masih kesulitan mendapatkan air bersih. Sudah dua tahun lebih sejak sumur bor kami dibangun, namun dusun di sebelah kami belum mendapatkan bantuan yang sama, padahal mereka lebih parah kondisinya,” ungkapnya.

Sumur bor menjadi simbol perjuangan mereka yang panjang, sekaligus menjadi pengingat bahwa hak dasar mereka harus dibeli dengan keringat dan pengorbanan.

“Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Kami kekurangan air, ekonomi sulit, dan masih harus memikirkan biaya tambahan untuk beli pulsa listrik agar bisa mengangkat air ke tandon,” ujarnya.

Mia juga menuturkan bagaimana beban ekonomi keluarganya semakin berat karena tanggung jawab baru ini.

“

Awalnya biaya listrik ditanggung oleh pihak pemberi kompensasi, tapi setelah beberapa bulan, kami harus membayar sendiri. Satu RT harus mengumpulkan uang,” katanya.

Warga Jelateng hidup dalam keterbatasan yang memaksa mereka bertahan dengan cara apa pun. Pengambilan air diatur secara bergilir, menuntut kesabaran dan pengertian di antara sesama. Mereka harus menunggu giliran demi menampung setiap tetes yang keluar dari sumur bor.

Air dari sumur bor mereka gunakan untuk kebutuhan yang lebih spesifik seperti memasak dan mencuci sayur, sementara air bersih yang dialirkan dari pagi hari menjadi persediaan terbatas untuk mandi. Namun, keterbatasan ini memaksa mereka membagi kebutuhan dengan hati-hati, seperti menabung setetes demi setetes.



Warga di lingkaran bendungan kini hanya bisa berharap agar pemerintah dan perusahaan lebih serius menangani dampak proyek PSN ini, yang mereka inginkan hanya hidup layak dan menagih janji adil pada jargon transisi energi berkeadilan yang digemborkan pemerintah.

“

Kami hanya ingin keadilan. Kami ingin kembali bisa hidup layak dengan air bersih dan mata pencaharian yang stabil,”  
ujar Maryam lirin.

## Hilang Hutan, Hancur Pertanian, Lenyap Mata Pencaharian

Sri masih ingat betul bagaimana udara di Dusun Ketapang dulu begitu sejuk, aromanya memancarkan wangi hutan yang rimbun. Ketika fajar merekah di ufuk timur, suara burung berkicau bersahutan, berpadu dengan derak bambu yang digerakkan angin. Di antara kerimbunan hutan itulah, penghidupan warga bertumbuh.

Aren bukan primadona satu-satunya yang menjadi sumber penghidupan sebagaimana cerita Ismiyati. Bagi Sri dan kebanyakan perempuan di dusun itu, hutan bukan sekadar bentangan hijau yang melingkupi kampung, melainkan sumber kehidupan yang mengasihi mereka dari generasi ke generasi.



“Jadi, kawasan ini dulunya adalah hutan lindung. Di atasnya ada aliran sungai, dan sekarang area tersebut dikeruk menjadi mangkuk bendungan. Ada dua dusun yang kini menjadi berseberangan, padahal dulunya mereka berada dalam satu kawasan hutan lindung yang menjadi sumber bahan baku untuk masyarakat,” kata Sri.

Dusun Ketapang, atau yang lebih dikenal sebagai "Dusun Sapu Ijuk" di seantero Lombok, dulunya merupakan pusat pengrajin sapu ijuk. Tradisi ini mengalir di setiap rumah. Setiap kali Sri melangkah di jalan berbatu kampungnya, ia bisa melihat para perempuan menunduk tekun di serambi rumah mereka, tangan cekatan menyatukan helaian ijuk menjadi sapu.

Para lelaki menjadi ujung tombak, berjalan jauh menjajakan hasil kerja keras itu ke pasar-pasar di kota. Dalam satu usaha pengrajin, biasanya ada sekitar 10 perempuan yang menjadi tukang jahit sapu dan tiga laki-laki yang bertugas menjualnya.

Namun, segalanya mulai berubah sejak deru mesin alat berat menembus sunyi hutan. Hutan yang dulu menjadi penyangga hidup perlahan menghilang, membuka jalan bagi proyek besar yang tak mereka pahami sepenuhnya.

Bahan baku yang selama ini mudah dijangkau kini menjadi langka. Para pencari ijuk harus melangkah lebih jauh, melintasi desa, bahkan hingga ke luar kabupaten. Perjalanan yang melelahkan itu diikuti dengan kenaikan harga bahan baku yang kian mencekik.



Jika dahulu selembur ijuk dihargai Rp2.000, kini melonjak menjadi Rp8.000 hingga Rp10.000. Bambu yang dulunya bisa dibeli seharga Rp50.000 per ikat kini melambung menjadi lebih dari Rp100.000.

Biaya produksi meroket, sementara harga jual terpaku. Akibatnya, dari puluhan pengrajin yang dulunya mengisi dusun dengan suara riuh aktivitas, kini hanya sekitar 15 orang yang masih bertahan.

"Dulu kami adalah pengrajin sapu ijuk. Bahan baku mudah didapat dari hutan sekitar desa. Sekarang, semua harus dibeli dari luar daerah dengan harga yang mahal. Ijuk yang dulu Rp2.000 per lembar, sekarang Rp8.000 sampai Rp10.000. Bambu yang dulu Rp50.000 per ikat, sekarang Rp100.000 lebih. Sekarang hanya 3% pengrajin yang bertahan," tutur Sri, suaranya parau, menyimpan getir dari kehilangan yang tak tergantikan.

Tak hanya pengrajin sapu ijuk yang merasakan dampak itu. Di sudut lain desa, Yayuk yang merupakan warga Dusun Jelateng, menceritakan bagaimana bendungan yang dibangun di sekitar mereka mengubah seluruh lanskap kehidupan.

Dusun Jelateng, yang dulunya dikenal sebagai sentra peternak ikan, kini sepi dari geliat kolam yang berkilauan di bawah matahari. Dahulu ada 13 orang dalam kelompok peternak ikan, masing-masing memiliki beberapa kolam. Sekali panen, mereka bisa menjual hingga puluhan kilogram ikan, cukup untuk menyambung hidup dan member nafkah keluarga.

"Kalau di Dusun Jelateng, mata pencahariannya adalah beternak ikan. Kalau saya tidak salah ingat, dulu pernah dilakukan identifikasi, ada satu kelompok peternak ikan di sana, terdiri dari 13 orang. Setiap orang rata-rata memiliki beberapa kolam. Saya pernah mewawancarai salah satu peternak yang memiliki empat kolam. Sekali panen, mereka bisa menjual puluhan kilogram ikan," enyuh Yayuk.

Setelah bendungan dibangun, air yang dahulu jernih kini menjadi keruh, mengalir membawa endapan lumpur dan sisa-sisa proyek. Ikan-ikan sulit dipanen, kolam menjadi tempat yang tak layak. Dari 13 peternak yang dulu tergabung dalam kelompok, kini hanya tersisa empat orang yang masih bertahan dengan hasil panen yang telah merosot lebih dari separuh.

"Tapi, sejak dibangunnya bendungan, kondisi air menjadi keruh. Air yang keruh itu tidak baik untuk kehidupan ikan karena tidak ada nutrisi dan malah membawa sampah yang membuat air tidak sehat. Dari 13 peternak yang diwawancarai waktu itu, sekarang tinggal sekitar empat orang yang masih memiliki kolam dengan ikan di dalamnya, meskipun hasilnya sudah sangat berkurang, bahkan lebih dari 50% penghasilannya menurun," cerita Yayuk.

Tak jauh dari kolam ikan yang mati perlahan, perempuan di Dusun Jelateng menghadapi tantangan serupa. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pengangkut pasir dan pemecah batu kali. Dengan tubuh terendam di air yang keruh dan berbau, mereka memecah batu-batu sungai menjadi serpihan yang layak dijual.



Namun, lumpur yang terbawa arus dari bendungan menutupi dasar sungai, membuat pekerjaan menjadi lebih sulit dan berdampak bagi kesehatan mereka.

“Dusun Jelateng juga ada warga yang bekerja sebagai pengangkut pasir dan pemecah batu kali. Sejak adanya bendungan, sungai jadi dangkal, batu-batu juga tertutup endapan. Tentu saja berdampak pada penghasilan mereka yang juga ikut berkurang,” jelas Yayuk.

Beban ganda menimpa para perempuan pemecah batu kali di Dusun Jelateng. Selain peran gender tradisional untuk mengurus rumah tangga, mereka harus mencari nafkah di tengah lingkungan yang semakin tidak ramah. Mereka yang masih memiliki tenaga beralih menjadi buruh tani, pekerja rumah tangga, atau bahkan memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negeri orang.

“Yang masih bertahan biasanya ibu-ibu yang sudah berumur dan tidak punya pilihan pekerjaan lain. Meski keuntungannya kecil, bahkan kadang tidak ada untung, mereka tetap melakukannya karena tidak ada pekerjaan lain. Perempuan yang masih produktif banyak yang beralih menjadi buruh tani, pekerja rumah tangga, atau jadi PMI (Pekerja Migran Indonesia),” terangnya.

Para petani padi juga harus menghadapi harga pupuk yang naik, hasil panen yang menurun, dan semakin sulitnya bertani di tanah yang telah tercemar limbah bendungan. Mujur tak bisa diraih, bala tak bisa ditolak, buruh tani yang semula sudah terbebani dengan beban ganda domestik mesti berkeringat lebih banyak lagi.

“

Sebelum bendungan dibangun, tiga bibit padi bisa menghasilkan 13 tanaman. Sekarang, meskipun tanam 6-7 bibit, hasilnya hanya sedikit karena serapan sari makanan di tanah berkurang,” ungkapnya.

Hilangnya hutan, tercemarnya air, dan rusaknya lahan pertanian telah mengubah wajah desa di lingkaran bendungan secara menyeluruh. Para petani yang dulu bisa memanen hingga satu ton padi setiap musim, kini hanya memperoleh sepertiga dari hasil biasanya. Lumpur yang terbawa dari bendungan mengendap di sawah, bercampur dengan limbah proyek, membuat tanah tak lagi mewah.

### III. Berakar Pada Keadilan Ekologis, Upaya Perempuan Lingkaran Bendungan mewujudkan Keadilan dalam Transisi Energi

PSN bendungan Meninting tidak membuat komunitas perempuan di lingkaran bendungan menolak serta merta transisi energi. Sebaliknya, mereka melihat ada potensi pengembangan lewat skema yang tertuju pada keadilan ekologis.



Sekolah Setara adalah komunitas perempuan tersebut. Mereka melihat masalah sampah rumah tangga sebagai potensi. "Kita hidup pasti ada sampah," ujar Raknah, kader Sekolah Setara.

Pemanfaatan ini dilihat sebagai upaya dalam pengelolaan sampah yang belum baik di Dasan Geria, tempat tinggal Raknah. Di sisi lain, upaya yang bermuara pada keadilan ekologis ini berusaha mengubah perspektif sampah dari hal tak bernilai sebagai tanggung jawab akan alam dan bahan baku untuk membangun kemandirian energi berbasis biogas.

"Kita kumpul perempuan-perempuan terkait masalah sampah ini. Jadinya teretuslah bagaimana kita mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga," katanya.

Perjalanan menuju pemanfaatan sampah menjadi biogas bukanlah tanpa hambatan. Komunitas yang didampingi Gema Alam NTB ini masih bernegosiasi dalam pembuatan fasilitas biogas ke pemerintah desa.

Meski telah ada konsep dan dukungan awal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), proyek biogas masih menghadapi kendala teknis dan birokrasi.

"Kita masih mengadvokasi ke desa. Sudah masuk ke draft, tapi masalah lahan masih belum jelas," jelas Raknah. Ketidakpastian terkait lahan menunjukkan bagaimana inisiatif berbasis komunitas sering kali berbenturan dengan kepentingan struktural yang lebih besar.

Kendati begitu, warga sudah mulai melakukan inisiatif pemilahan sampah sebagai langkah awal. Sriyanti misalnya, ia selalu memilah sampahnya berdasarkan jenis hayati dan nonhayati pada dua botol berbeda. Hal itu ia lakukan di rumahnya maupun di rumah majikan tempat ia bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

“

Ya, saya selalu memilah ini sampahnya dipisah yang organik, di mana saja ya begitu," cerita Sriyanti.



Sebagai perempuan disabilitas, Sriyanti merasa terbentuknya komunitas pemberdayaan perempuan seperti Sekolah Setara diperlukan di tengah lingkungan yang krisis. Ia merasa suaranya sebagai perempuan disabilitas lebih dapat didengar hingga disilakan untuk menyampaikan aspirasinya pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa.

"Saya tahun lalu pertama kali ikut musrenbang. Senang merasa akhirnya saya sebagai disabilitas bisa juga untuk bersuara," ujarnya.

Sriyanti sendiri merupakan salah satu kader aktif Sekolah Setara yang rela menyisihkan waktu di sela pekerjaannya yang tanpa hari libur sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di dua rumah dan pekerja jasa pijat. Ia rela memadatkan waktunya lebih kencang untuk pemberdayaan kendati mesti bekerja dan mengurus suami yang sakit, ibu, bibi, tiga anak, serta bibi dan sepupu dengan disabilitas mental.

"Bisa diatur saja waktu-waktunya. Sejauh ini tidak ada masalah buat saya," seru Sriyanti saat ditanya bagaimana dia membagi waktu.

Gerakan perempuan ini juga menghasilkan pekerja pengepul sampah yang sebelumnya tidak ada. Dengan biaya iuran Rp15.000 per bulan per kepala keluarga, sampah kini diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar dusun yang telah bekerja sama.

Sebelum komunitas ini berdiri, seringkali sampah dibuang sembarangan ke kebun atau sungai, tak jarang dikubur atau dibakar.

"Dulu banyak sekali orang buang sampah di kebun kami di sebelah. Atau ya dibakar, dibuang ke sungai," ungkap Raknah, mengingat bagaimana ruang hidup mereka dicemari.

Komunitas ini tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga pada penegakan disiplin lingkungan. Mereka membersihkan sampah di bawah jembatan dan menegur warga yang membuang sampah sembarangan.

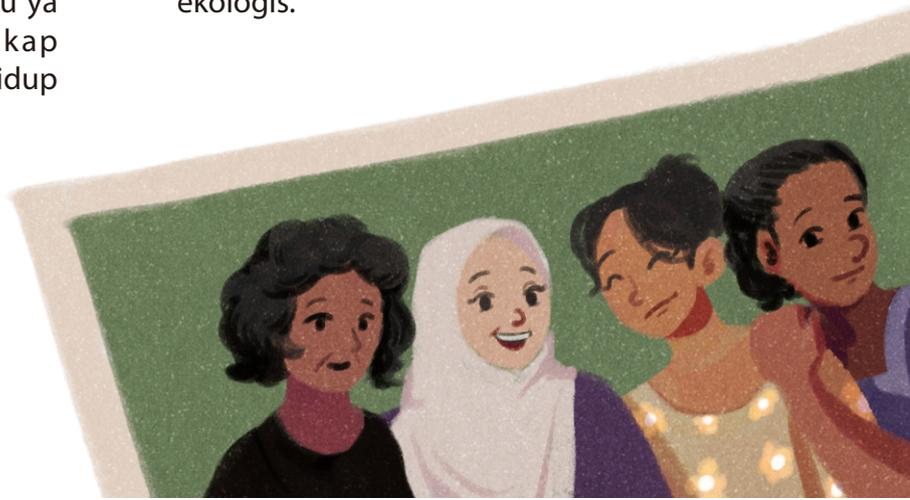
"Biasanya di sana bukan warga Dasan Geria saja yang buang sampah," kata Raknah, menyoroti bagaimana praktik pembuangan sampah menjadi persoalan lintas batas.

Di tengah megaprojek PSN yang mengancam ruang hidup dengan mengotori air bersih, komunitas perempuan berjuang memanfaatkan sampah menjadi energi bersih.

Transisi energi yang dijanjikan oleh negara sering kali melupakan keadilan bagi komunitas di tingkat akar rumput. Sedang komunitas perempuan di Dasan Geria, transisi energi biogas bukan sekadar proyek teknis, melainkan upaya membangun otonomi dan merawat kehidupan.

Dengan memanfaatkan sampah menjadi energi, mereka menantang narasi dominan tentang transisi energi yang cenderung maskulin dan eksploitatif. Mereka menunjukkan bahwa solusi energi yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika suara perempuan dan komunitas lokal diakui dan diutamakan.

Perjuangan ini masih panjang. Tetapi di setiap karung sampah yang dikumpulkan dan di setiap langkah advokasi yang ditempuh, mereka membuktikan bahwa transisi energi yang sejati harus berakar pada keadilan ekologis.



# Epilog

Di balik jargon "energi bersih" yang dielukan penguasa, tubuh-tubuh perempuan menanggung beban yang tak terlihat di dalam laporan resmi: kulit yang meradang karena air tercemar, punggung yang letih memikul galon demi galon air bersih, hati yang resah setiap kali hujan mengguyur, khawatir banjir bah datang tanpa ampun. Mereka yang dahulu tinggal di tepi sungai, hidup dari air yang mengalir jernih, kini harus berjalan jauh mencari setetes air bersih. Air yang dulunya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi ancaman yang merongrong kewarasan mereka.

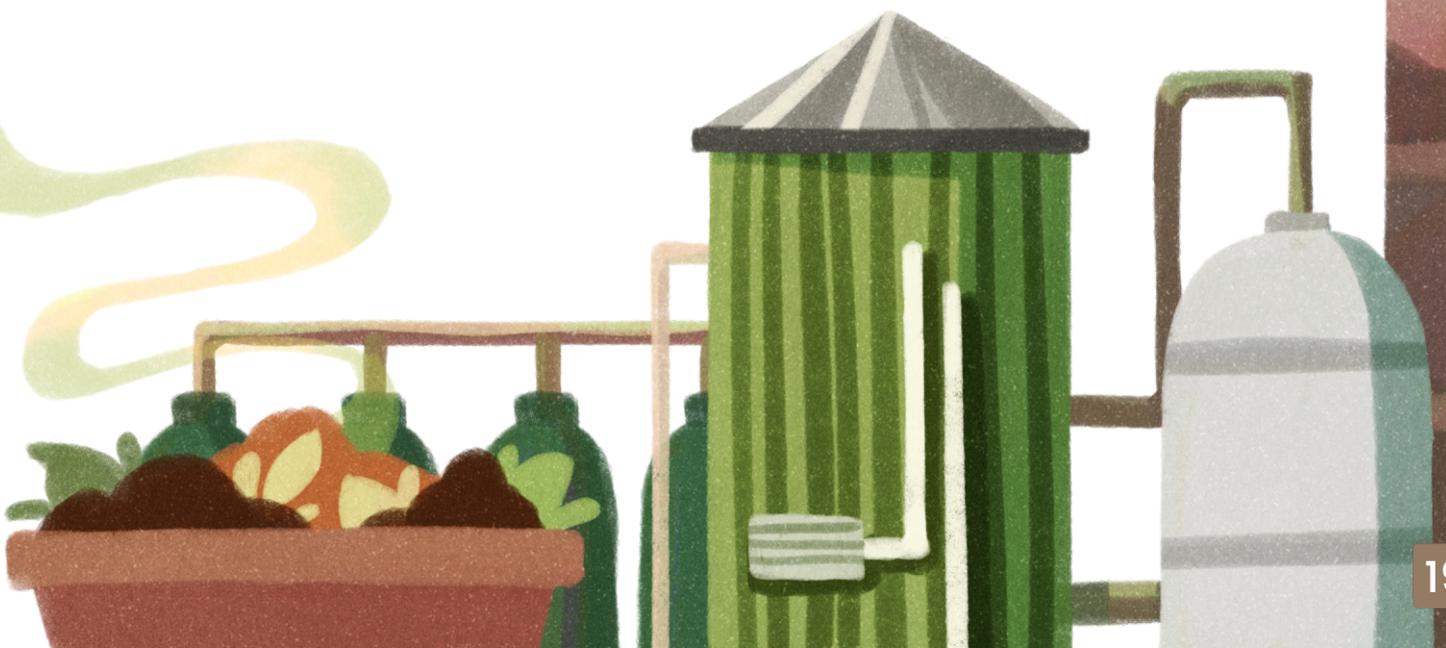
Hilangnya hutan di hulu bendungan membuat angin bertiup kencang tanpa ditahan pohon saat kemarau dan lumpur meluap penuh di musim hujan. Para perempuan buruh tani yang dahulu mengandalkan kebun aren, bambu, dan pangan lokal kini kehilangan sumber penghidupan mereka.

Peternakan ikan yang menjadi tumpuan ekonomi pun musnah, air yang keruh dan tercemar membunuh kehidupan di dalam kolam. Pengrajin sapu ijuk yang dahulu hidup dari hasil hutan, kini hanya tinggal sebagian kecil yang bertahan karena bahan baku terbatat bersama pepohonan yang digusur alat berat.

Di antara kesunyian yang dipaksa, perempuan-perempuan ini menolak bungkam. Mereka paham, ketika hutan dihilangkan, akar kehidupan mereka tercerabut pula. Dalam langkah-langkah kecil, mereka membangun perlawanan, menjaga alam semampunya lewat pemanfaatan sampah ke biogas, mengorganisir komunitas, menuntut keadilan dari pemerintah desa hingga perusahaan, dan yang terpenting, menjaga solidaritas di tengah keterasingan.

Proyek itu barangkali akan membendung aliran sungai, tetapi tidak bisa membendung suara perempuan yang berseru menuntut hak mereka atas air bersih, atas tanah yang lestari, atas hidup yang bermartabat. Dalam setiap tetes keringat mereka yang jatuh ke bumi, tersimpan harapan tipis bahwa keadilan ekologis bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan kenyataan yang harus diperjuangkan. Dengan suara, dengan tubuh, dan dengan cinta yang menolak dihancurkan.

Maka, selama air masih mengalir dan bumi masih berdenyut, mereka tidak akan berhenti melawan. Karena mereka tahu, di balik setiap pohon yang tumbang dan setiap bendungan yang menjulang, ada cerita perempuan yang menjaga hidup dan lingkungannya sebelum jejak tersapu air bercampur oli lagi lumpur.



© 2025